

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Saat ini, teknologi sudah menjadi kebutuhan bagi setiap negara. Baik itu merupakan negara maju maupun negara berkembang. Teknologi hampir telah menyentuh ke setiap aspek kehidupan di masyarakat, bahkan teknologi cenderung mendominasi. Maka atas dasar itu dapat dikatakan bahwa tidak ada satu pun negara yang luput dari peran teknologi, begitu pun dengan Indonesia. Dalam bidang teknologi militer memang Indonesia saat ini belum setara dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Rusia. Namun hal tersebut bukan berarti Indonesia tidak dapat mengejar ketertinggalan teknologi negara tersebut, terdapat cara yang dapat digunakan untuk mengejar ketertinggalan teknologi tersebut yaitu melalui *defense offset* bagi industri pertahanan. *Defense Offset* sangat berperan dalam pengembangan kapabilitas industri pertahanan karena dengan berkembangnya industri pertahanan suatu negara juga merupakan *deterrent factor* yang penting bagi sistem pertahanan negara dalam menghasilkan suatu kemampuan pertahanan negara yang unggul dan mandiri.

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menyertakan *defense offset* dalam pengadaan alutsista dari luar negeri. Salah satunya adalah dalam pengadaan pesawat jet tempur Sukhoi tahap III. Indonesia mengajukan keterlibatan BUMNIP sebagai mitra lokal pada Pemeliharaan Perbaikan dan Overhaul (PPO) untuk semua peralatan militer yang telah diperoleh dari Rusia. Indonesia juga mengusulkan keterlibatan BUMNIP sebagai mitra lokal pada pengadaan berikutnya dengan konten lokal seperti instalasi, perakitan, integrasi sistem, Pemeliharaan Perbaikan dan Overhaul (PPO), logistik dan dukungan teknis, produksi bersama, dan suku cadang atau komponen produksi minimal 20%. Namun dalam implementasinya *defense offset* tersebut tidaklah terealisasi. Adapun tidak terealisasinya *defense offset* tersebut disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal dipengaruhi oleh kesiapan industri pertahanan dalam negeri dalam hal ini adalah PT. Dirgantara Indonesia yang dapat dilihat dari

aspek pemasaran, aspek operasional, dan aspek sumber daya manusia, kemudian dari peran pemerintah sebagai *stakeholder* yang dapat dilihat dari sisi anggaran, regulasi dan kebijakan serta pola pengadaan alutsista itu sendiri. Sedangkan faktor eksternalnya adalah dari pihak negara produsen itu sendiri yaitu dalam hal ini adalah Rusia. Nyatanya, pengimplementasian *offset* dalam pengadaan alutsista dari luar negeri tidaklah hanya bisa mengandalkan peran dari satu pihak saja, namun dari pihak penerima maupun pengalih teknologi juga harus sama-sama siap. Negara penerima teknologi harus sudah siap dengan didukung oleh kesiapan industrinya dan pemerintahnya sedangkan negara pengalih teknologi juga harus bersedia mengalihkan teknologinya. Kekurangan dari satu pihak membuat *offset* tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan jelas menunjukkan bahwa *defense offset* antara Indonesia dengan Rusia belum dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Minimnya pengalaman Indonesia dalam menerapkan *defense offset* pada alat pertahanan premier sekelas pesawat Sukhoi, belum selarasnya antara kebijakan *offset* dengan kesiapan industri pertahanan lokal maupun preferensi Rusia dalam menjalin kerjasama teknik militer, lalu peraturan *offset* yang belum jelas dan tidak sesuai dengan nilai pengadaan, dan pola pengadaan alutsista Indonesia sendiri yang masih belum menempatkan *offset* sebagai sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi menjadi persoalan yang membuat *defense offset* dalam pengadaan pesawat jet tempur Sukhoi tahap III ini belum dapat terealisasi.

IV.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian realisasi *defense offset* dalam pengadaan pesawat jet tempur Sukhoi tahap III, didapat saran-saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya, antara lain perlu dilakukannya kajian dan analisa yang lebih mendalam terhadap pentingnya *defense offset* dalam meningkatkan kapabilitas industri pertahanan dalam negeri. Selain itu perlu dianalisa lebih dalam juga terkait peran negara dalam meningkatkan kapabilitas industri pertahanan dalam negeri karena dalam upaya alih teknologi, peran negara sangatlah penting sebagai aktor paling rasional dalam proses negosiasi.